



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2017**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Lingkungan Strategis	6
D. Permasalahan Yang Dihadapi	9
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	47

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
2. KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENETAPAN INDKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021



KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng menyusun Laporan Kinerja tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan atas realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng selama tahun 2017.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2017 dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng karena adanya dukungan dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, meskipun masih terdapat indikator yang masih perlu dukungan lebih dari setiap Bagian.

Di samping keberhasilan, tentu dalam setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng masih terdapat kekurangan dalam memberikan data dan informasi, berhubung masih terbatasnya sumber daya manusia.

Meskipun secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dapat dikatakan “berhasil” mencapai target yang ditetapkan, namun pada beberapa kegiatan masih perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan



kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait terutama para Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng untuk mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Watansoppeng, Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ANDI TENRI SESSU, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640528 199103 1 009



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja Tahun 2017 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada penetapan/perjanjian kinerja tahun 2017 yang merupakan bentuk komitmen penuh Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Rata-rata capaian sasaran adalah 99.01 persen. Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1	Terlayannya Kedinasan KDH dan WKDH dengan Baik	100 %
2	Meningkatnya Jumlah SKPD yang Kelembagaannya telah Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100 %



NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
3	Meningkatnya Pelayanan Publik Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	83,3 %
4	Terwujudnya Penyelesaian Regulasi dan Kasus Hukum Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100 %
5	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	0,02%
6	Terwujudnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Melalui Teknologi Informasi yang Berkualitas	100 %
7	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pelelangan/Seleksi yang terselesaikan dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %
8	Terfasilitasinya Fungsi Koordinasi pada SKPD yang Terkait Tugas Pokok dan Fungsi	95,90 %
9	Sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	93.17%
10	Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	99.92%
Rata Capaian Sasaran		99.01%

Dari 10 (Sepuluh) sasaran tersebut diatas dicapai melalui pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 16 Program dan 86 kegiatan. Dalam merealisasikan sasaran tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng telah menggunakan dana sebesar Rp. 27,727,282,041.00 atau 93,46% dari pagu anggaran sebesar Rp. 29,666,773,395.00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Sekretariat Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai



perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Soppeng. Dengan posisi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggungjawab serta terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng selalu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka mewujudkan Soppeng yang Lebih Maju, Berdaya Saing dan Religius.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Soppeng tidak mungkin terwujud tanpa dukungan aparat pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus mampu menampilkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara

perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e) Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, keuangan peralatan/perengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah;
- f) Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari :

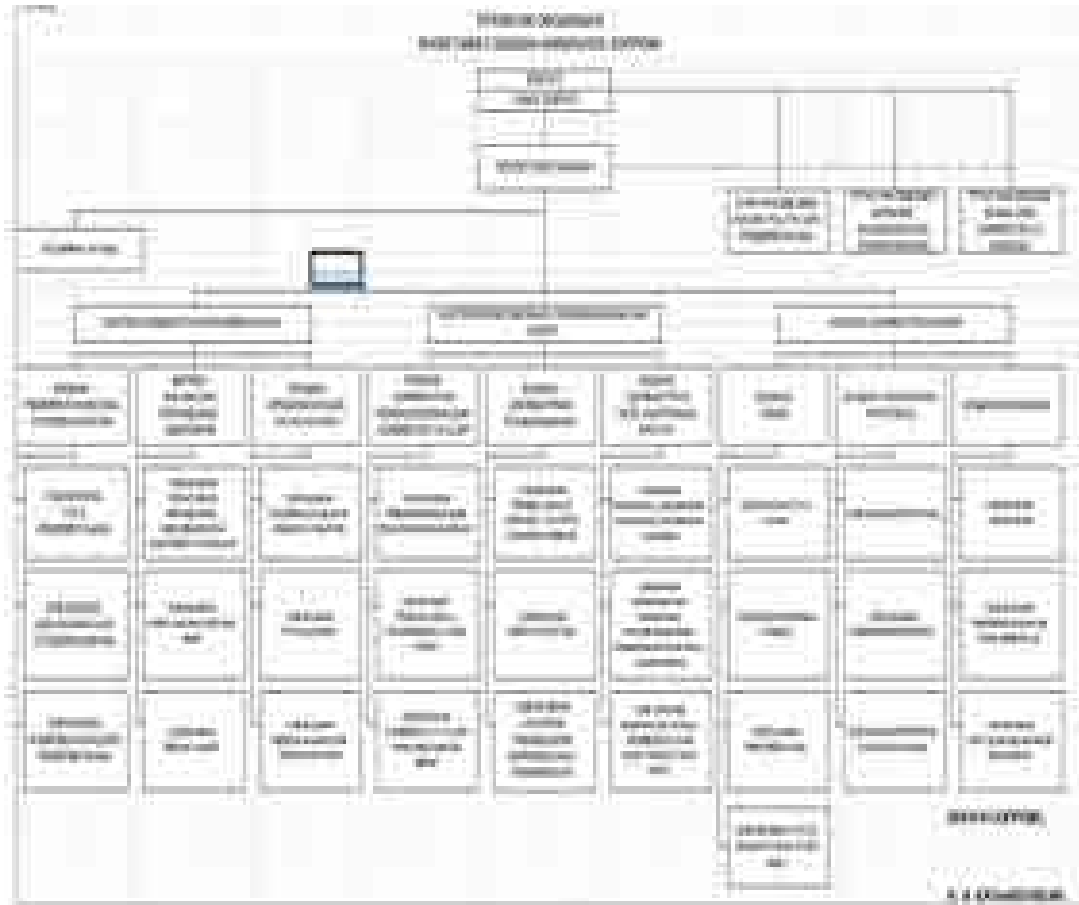
- a) Sekretaris Daerah
- b) Asisten Administrasi Pemerintahan :
 - 1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - (a) Sub Bagian Tata Pemerintahan
 - (b) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah



- (c) Sub Bagian Koordinasi Urusan Pemerintah
- 2) Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 - (a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
 - (b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - (c) Sub Bagian Tindak Lanjut
- 3) Bagian Organisasi dan Tatalaksana
 - (a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - (b) Sub Bagian Tatalaksana
 - (c) Sub Bagian Kepegawaian SDM Aparatur
- c) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra :
 - 4) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - (a) Sub Bagian Perekonomian dan Badan Usaha Daerah
 - (b) Sub Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
 - (c) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 5) Bagian Administrasi Pembangunan
 - (a) Sub Bagian Perencanaan, Litbang dan Statistik dan Persandian
 - (b) Sub Bagian Infrastruktur
 - (c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 6) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
 - (a) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - (b) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB dan Agama
 - (c) Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



- c) Asisten Administrasi Umum :
 - 7) Bagian Umum
 - (a) Sub Bagian Tata Usaha
 - (b) Sub Bagian RumahTangga
 - (c) Sub Bagian Perlengkapan
 - (d) Sub Bagian Tata Usaha pada Staf Ahli
 - 8) Bagian Humas da Protokol
 - (a) Sub Bagian Peliputan
 - (b) Sub Bagian Penghubung Pemda
 - (c) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan
 - 9) Bagian Keuangan
 - (a) Sub Bagian Anggaran
 - (b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi
 - (c) Sub Bagian Aset dan Pelaporan Keuangan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
sebagai berikut :



C. Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Eksternal

Adapun lingkungan eksternal yang berpengaruh antara lain :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pebuatan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;



2. Lingkungan Internal

Adapun lingkungan internal yang berpengaruh antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ditunjang dengan sumber daya manusia sebanyak 280 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 116 orang, Tenaga Kontrak sebanyak 21 orang dan Tenaga PHTL sebanyak 143 orang.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	STATUS	JUMLAH	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	PNS	116	65	51	
2.	Tenaga Kontrak	21	11	10	
3.	Tenaga PHTL	143	67	76	

Sumber : Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Soppeng 2017

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa:

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Tanah	149 Bidang
2.	Gedung dan Bangunan Kantor	57 Unit
3.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	62 Unit
4.	Kendaraan Bermotor Penumpang	3 Unit
5.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2 Unit
6.	Kendaraan Roda 2	61 Unit
7.	Kendaraan Roda 3	1 Unit
8.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1 Buah
9.	Mesin Ketik	7 Buah
10.	Mesin Hitung	4 Buah
11.	Alat Reproduksi (Penggandaan)	1 Buah
12.	Meja Kerja	107 Buah
13.	Meja Rapat	11 Buah
15.	Kursi Kerja	220 Buah
16.	Kursi Rapat	4.412 Buah
17.	Kursi Tamu + Meja	1 Buah
18.	Lemari Besi /Rak Besi/Metal	17 Buah
19.	Rak Kayu	35 Buah
20.	Lemari Kaca	23 Buah
21.	Lemari Rak	70 Buah



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
22.	Lemari Buku/Arsip	3 Buah
23.	Lemari Makan	17 Buah
24.	Filling Kabinet	73 Buah
25.	Meubelair	2.170 unit
26.	P.C. unit	84 Unit
27.	Laptop	39 Unit
28.	Komputer Server	34 Unit
29.	Hard Disk	3 Unit
30.	Printer	145 Unit
31.	Scanner	8 unit
32.	Peralatan Jaringan	3 unit
33.	Telepon	11 Unit
34.	AC	150 Unit
35.	Televisi	86 unit
36.	Mesin Tik	7 Buah
37.	Mesin Foto Copy	1 Buah

Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Soppeng 2017

c. Sumber Dana

Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dengan alokasi pembiayaan belanja sebesar Rp29,666,773,395.00 dana tersebut terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp7,297,157,819.00 dan Anggaran Belanja Langsung sejumlah Rp22,369,615,576.00.

Secara lebih rinci dapat dilihat tabel di bawah ini :

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	Belanja Langsung	Rp 22,369,615,576.00
	Belanja Pegawai	Rp 1,312,660,000.00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 20,058,822,926.00
	Belanja Modal	Rp 997,979,550.00
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp 7,297,157,819.00
	Belanja Pegawai	Rp 7,784,124,063.00
	JUMLAH	Rp 29,666,773,395.00

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Soppeng 2017

D. Permasalahan Yang Dihadapi

Adapun permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan;
2. Masih belum terkoordinasinya perencanaan Bagian-Bagian pada lingkup Sekretariat Daerah secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan yang bersifat mandiri, menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat Daerah belum maksimal;
3. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya;
4. Masih ada kebijakan dan regulasi pusat yang belum sinergis baik dalam penetapan maupun pengaturannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya di daerah.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2017
- 2) SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Sekretariat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama periode 2016 - 2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Soppeng 2016 - 2021.

Renstra Sekretariat Daerah memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen selama 5 (lima) tahun ke depan; memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Renstra Sekretariat Daerah merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah yang merupakan rencana tahunan Sekretariat Daerah selama periode lima tahun, 2016-2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Sekretariat Daerah diterbitkan melalui Keputusan Bupati Soppeng, dan didalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengawasan dan evaluasi sesuai kriteria dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,

transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *Good governance*.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2017
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik	72%
2	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Tinggi
3	Jumlah Insiden terkait kehidupan beragama	Tidak ada insiden
4	Jumlah nilai investasi (Rp.)	641.321.681.092
5	Persentase masyarakat yang tidak menyalahgunakan narkoba	100%
6	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	C
7	Rasio rumah ibadah/jumlah penduduk	2,06
8	Persentase penyelenggaraan kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100%
9	Jumlah rencana investasi (Jumlah MOU)	35

Pada tabel berikut dapat dilihat Rencana Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah dan Indikator Kinerja Daerah:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)
1.	Terlayannya kedinasan KDH & WKDH dengan baik	Persentase Kedinasan yang terlayani dengan baik	100
2.	Meningkatnya Jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kelembagaan SKPD yang sesuai kebutuhan	90
3.	Meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang melaksanakan SPM	100
4.	Terwujudnya Penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rasio Regulasi dan kasus hukum yang terselesaikan	100
5.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalagunaan narkoba	Jumlah masyarakat yang menyalahgunakan narkoba	<10 orang
6.	Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas	Tersedianya sistem informasi pemerintah daerah	100
7.	Terwujudnya Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Rasio Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/ seleksi yang selesai tepat waktu	Ada
8.	Terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi	Persentase SKPD yang terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya	100
9.	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100
10.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100

Kedua Indikator Kinerja yang direncanakan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 secara simultan harus dapat tercapai secara bersamaan dan saling terkait satu sama lain. Pengukuran capaian kinerja setiap akhir periode akan dilakukan sebagai konsekuensi dari kontrak kinerja Sekretariat Daerah dan menjadi ukuran berhasil tidaknya setiap program kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Pencapaian kinerja sebagaimana tugas dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, seperti yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan yang Ditetapkan Dalam Rencana Strategis (Renstra)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
1	2	3
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	
	1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	
	2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	
	3. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	
	4. Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	
2.	Program Penguatan Kelembagaan	
	1. Penyusunan Kompetensi / Analisis Jabatan	
	2. Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi	
	3. Penyusunan Road Map program reformasi birokrasi	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
	1. Penguatan Kinerja Pelayanan Publik	
	2. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	
	3. Inovasi Pelayanan Publik	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
1	2	3
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pelayanan Publik	
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
	1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	
	2. Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah	
	3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	
5.	Program Pemberian Pertimbangan Pendapat dan Pendampingan Hukum Keluarga Miskin	
	1. Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin	
6.	Program Penataan peraturan perundang-undangan	
	1. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	
	2. Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN	
	3. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	
	4. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	
	5. Kegiatan Kajian peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah	
	6. Publikasi peraturan perundang-undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau	
7.	Program Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	1. Fasilitasi pelaksanaan pemberangkatan/pemulangan Jamaah Haji	
	2. Fasilitasi pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan	
	3. Fasilitasi pelaksanaan/keikutsertaan MTQ dan STQ	
	4. Fasilitasi pelaksanaan Festival Anak Sholeh	
	5. Pengembangan nilai budaya LASQI	
	6. Peningkatan nilai-nilai keagamaan	
	7. Fasilitasi penanganan narkoba melalui sistem pencegahan, penyalahgunaan dan pemberantasan gelap narkoba (P4GN)	
8.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
	1. Orientasi keprotokoleran	
	2. Peningkatan kegiatan keprotokoleran	
9.	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan daerah	
	1. Pengendalian dan peningkatan data pembangunan se Kabupaten Soppeng	
	2. Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten	
10.	Program Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
	1. Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)	
	2. Evaluasi pengadaan barang/jasa	
11.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemda	
	1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	
	2. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	
	3. Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal	
	4. Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan darat dan data Pameran Pemerintah Daerah	
	5. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	
	6. Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
1	2	3
	Kecamatan (PATEN) di Kecamatan	
	7. Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
	8. Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng	
	9. Fasilitasi Agen/ Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi	
	10. Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian	
	11. Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran	
	12. Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu lintas Ternak	
	13. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	
	14. Fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak Kriminal	
	15. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD	
	16. Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat	
12.	Program Peningkatan Pengembangan sistem evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah	
	1. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	
	2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	
	3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten	
13.	Program Pelayanan Perkantoran	
	1. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	
	2. Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam dan keluar daerah	
	3. Penyediaan operasional Mess Pemda Jakarta	
	4. Penyediaan jasa perkantoran	
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	
	6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	7. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
	8. Penyediaan layanan kebersihan kantor	
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	10. Penyediaan bahan logistik kantor	
	11. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	12. Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH	
	13. Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH/WKD	
14.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
	2. Peningkatan disiplin aparatur	
	3. Administrasi kepegawaian	
	4. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	
15.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
1	2	3
	4. Peningkatan Manajemen Aset	
16.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional	
	2. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	
	4. Pengadaan meubelir	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	
	6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	
	7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
	8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	
	9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
	10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	
	11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
	12. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	
	13. Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar, tempat parkir	
	14. Pemeliharaan rutin berkala peralatan studio dan komunikasi	

Adapun perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017, dapat di lihatta pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)
1.	Terlayannya kedinasan KDH & WKDH dengan baik	Persentase Kedinasan yang terlayani dengan baik	100
2.	Meningkatnya Jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kelembagaan SKPD yang sesuai kebutuhan	90
3.	Meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang melaksanakan SPM	100
4.	Terwujudnya Penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rasio Regulasi dan kasus hukum yang terselesaikan	100



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)
5.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalagunaan narkoba	Jumlah masyarakat yang menyalahgunakan narkoba	<10 orang
6.	Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas	Tersedianya sistem informasi pemerintah daerah	100
7.	Terwujudnya Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Rasio Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang selesai tepat waktu	Ada
8.	Terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi	Persentase SKPD yang terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya	100
9.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100
10	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Pemberian pertimbangan pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	Rp. 53.025.000,00	DAU
2.	Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH	Rp 4.526.700.000,00	DAU
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp 119.025.000,00	DAU
4.	Program Penguatan Kelembagaan daerah	Rp 173.647.375,00	DAU
5.	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemda	Rp 561.063.700,00	DAU
6.	Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat keagamaan dan penanggulangan narkoba	Rp 1.586.207.450,00	DAU



7.	Program pengendalian administrasi pembangunan daerah	Rp	40.660.000,00	DAU
8.	Program penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa	Rp	209.600.000,00	DAU
9.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp	261.617.500,00	DAU
10.	Program pembinaan dan pengembangan keprotokoleran	Rp	256.390.750,00	DAU
11.	Program penataan peraturan perundang undangan	Rp	523.100.000,00	DAU
12.	Program pengembangan kapasitas kinerja pelayanan publik	Rp	246.296.700,00	DAU
13.	Program Pelayanan Perkantoran	Rp	8.790.362.551,00	DAU
14.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	4.522.254.000,00	DAU
15.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Rp	334.890.075,00	DAU
16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	164.775.475,00	DAU
JUMLAH TOTAL		Rp.	22.369.615.576,00	

Lembar / dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian setiap kinerja sasaran dilakukan analisis:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja. Secara matematis, dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

95 s/d 100 = Sangat Memuaskan

80 s/d <95 = Memuaskan

50 s/d <80 = Cukup Memuaskan

0 s/d <50 = Kurang Memuaskan

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Sedangkan indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1: Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi 2016	Capaian
1. Terlayannya kedinasan KDH & WKDH dengan baik	Persentase Kedinasan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
2. Meningkatnya Jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kelembagaan SKPD yang sesuai kebutuhan	%	90	90	100
3. Meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang melaksanakan SPM	%	100	83.3	83.3
4. Terwujudnya Penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan	Rasio Regulasi dan kasus hukum yang terselesaikan		100	100	100

perundang-undangan yang berlaku					
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalagunaan narkoba	Jumlah masyarakat yang menyalahgunakan narkoba		<10 orang	54	0.02
6. Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas	Tersedianya sistem informasi pemerintah daerah	%	100	100	100
7. Terwujudnya Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Rasio Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/ seleksi yang selesai tepat waktu		Ada	Ada	100
8. Terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi	Persentase SKPD yang terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya	%	100	91.96	91.96
9. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	%	100	93.17	93.17
10. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	99.92	99.92

A. Capaian Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Capaian Kinerja Tahun 2017
1.	Terlayannya kedinasan KDH & WKDH dengan baik	Persentase Kedinasan yang terlayani dengan baik	100 %	100%	100%
2.	Meningkatnya Jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kelembagaan SKPD yang sesuai kebutuhan	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang melaksanakan SPM	100%	83.3%	83.3%
4.	Terwujudnya Penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rasio Regulasi dan kasus hukum yang terselesaikan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalagunaan narkoba	Jumlah masyarakat yang menyalahgunakan narkoba	<10 orang	54	0.02%
6.	Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas	Tersedianya sistem informasi pemerintah daerah	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Rasio Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/ seleksi yang selesai tepat waktu	Ada	Ada	100%
8.	Terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi	Persentase SKPD yang terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya	100%	91.96%	91.96%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Capaian Kinerja Tahun 2017
9.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100%	93.17%	93.17%
10.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	99.92%	99.92%

Indikator Kinerja Daerah Sekretariat Daerah yang mendukung Sasaran Strategis dalam Renstra Tahun 2016-2021 sebanyak 10 Indikator, dan dari Jumlah tersebut dibagi berdasarkan criteria sebagai berikut:

a. Sangat Memuaskan

Capaian kinerja Tahun 2017 dari 95 s/d 100, sebanyak 6 Indikator

b. Memuaskan

Capaian Kinerja Tahun 2017 dari nilai 80 s/d 95, sebanyak 3 Indikator

c. Kurang Memuaskan

Capaian Kinerja Tahun 2017 dari 0 s/d 50 sebanyak 1 Indikator

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Sasaran 1, Terlayannya Kedinasan KDH dan WKDH dengan Baik.**

Keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-1

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2021
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Persentase Kedinasan yang Terlayani dengan Baik	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Soppeng 2017

Untuk mengetahui prestasi capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun, dapat membandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
		Kondisi Awal	2016	2017
1.	Persentase Kedinasan yang Terlayani dengan Baik	100	100	100

Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Soppeng

Adapun indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dijelaskan sebagai berikut :

- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Kedinasan yang Terlayani dengan Baik” dapat dicapai sebesar 100% pada tahun 2017 yang artinya target kinerja pada sasaran ini terpenuhi. Hal ini didukung adanya beberapa kegiatan diantaranya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat yang memberikan output meningkatnya hubungan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah yang berdampak pada optimalnya pelayanan dan kinerja perangkat daerah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah memberikan fasilitasi terhadap pelayanan kedinasan KDH dan WKDH dengan baik.

b. Sasaran 2, Meningkatnya Jumlah SKPD yang Kelembagaannya telah Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-2

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2021
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Persentase Kelembagaan SKPD yang Sesuai Kebutuhan	90	90	100	100	100

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng 2017

Untuk mengetahui prestasi capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun, dapat dibandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
	Kondisi Awal	2016	2017
Persentase Kelembagaan SKPD yang Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng

Adapun indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dijelaskan sebagai berikut :

- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Kelembagaan SKPD yang Sesuai Kebutuhan” dapat dicapai 100%, ini didapat dari jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan. Adapun faktor penunjang keberhasilan indikator kinerja ini antara lain rancangan produk-produk hukum daerah berupa peraturan daerah dan peraturan Bupati/dokumen informasi jabatan. Strategi lain yang dilakukan adalah melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dukungan staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

c. **Sasaran 3, Meningkatnya Pelayanan Publik Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.**

Keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-3

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 %	Target Tahun 2021 %
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Persentase SKPD Pelayanan Publik yang Melaksanakan SPM	100	83,3	83,3	83,3	100

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng 2017

Untuk mengetahui prestasi capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun, dapat membandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.6: Perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
	Kondisi Awal	2016	2017
Persentase SKPD Pelayanan Publik yang Melaksanakan SPM	80%	83,3	83,3

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng

Adapun indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dijelaskan sebagai berikut :

- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase SKPD Pelayanan Publik yang Melaksanakan SPM” hanya dapat dicapai sebesar 83,3% dari target yang direncanakan 100%. Capaian 83,3% ini dihitung berdasarkan jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini didasari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang jelas mengatur urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan oleh 6 (enam) SKPD yakni Pendidikan, Pelayanan Terpadu, Ketahanan Pangan, Kesehatan dan Dinas Sosial. Namun pada kenyataannya Dinas Sosial belum melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran. Adapun langkah-langkah

yang mendukung pencapaian sasaran dengan melengkapi regulasi bidang ketatalaksanaan dan peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap kualitas pelayanan publik.

d. Sasaran 4, Terwujudnya Penyelesaian Regulasi dan Kasus Hukum Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-4

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 %	Target Tahun 2021 %
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Rasio Regulasi dan Kasus Hukum yang terselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Hukum & Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng 2017

Untuk mengetahui prestasi capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun, dapat membandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.8: Perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
	Kondisi Awal	2016	2017
Rasio Regulasi dan Kasus Hukum yang Terselesaikan	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum & Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng

Adapun indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dijelaskan sebagai berikut :

- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Rasio Regulasi dan Kasus Hukum yang Terselesaikan” dapat dicapai 100%. Capaian indikator kinerja dari target 100% dan terealisasi 100%. Hal ini didukung karena adanya kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan

konsepsi atas produk-produk hukum daerah Kabupaten Soppeng yaitu Peraturan Daerah sebanyak 16 buah, Peraturan Bupati sebanyak 93 buah, Keputusan Bupati sebanyak 1.191 buah dan penanganan 5 (lima) kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yakni gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Soppeng terhadap pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Soppeng pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah mempunyai keputusan tetap.

e. Sasaran 5, Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.

Keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-5

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 %	Target Tahun 2021 %
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Jumlah Masyarakat yang Menyalahgunakan Narkoba	<15 org	45 org	0,02	64 org	<15 org

Sumber : Sat Narkoba Polres Soppeng 2017

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun, dapat dibandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.10: Perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
	Kondisi Awal	2016	2017
Rasio Regulasi dan Kasus Hukum yang terselesaikan	12	0,03	0,02

Sumber : Sat Narkoba Polres Soppeng 2017

Adapun indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dijelaskan sebagai berikut :

- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Jumlah Masyarakat yang Menyalahgunakan Narkoba” tidak tercapai dikarenakan adanya 45 orang yang tersandung masalah penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017, Nilai rata-rata 0,02% dihitung dari jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 249.768 orang dibanding jumlah masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Pada tabel perbandingan jelas terlihat tahun 2015 pengguna narkoba 22 orang, kemudian tahun 2016 bertambah menjadi 64 orang. Data ini membuktikan kalau narkoba bukan lagi barang yang sulit didapat, bahkan peredaran narkoba sudah merambah masuk ke pelosok pedesaan. Melihat hal ini, tentunya pemerintah daerah tidak tinggal diam, adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan bertambahnya jumlah tersebut yakni telah dilaksanakan sosialisasi/penyuluhan sebanyak 8 kali di beberapa titik. Komitmen pemerintah daerah bersama elemen masyarakat melawan narkoba, salah satunya Deklarasi Soppeng Tolak Narkoba, serta dukungan kepada penegak hukum untuk memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada pengedar ataupun bandar narkoba. Kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan dengan menambah intensitas pelaksanaan penyuluhan bahaya dampak penyalahgunaan narkoba dan memberi himbauan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan mulai dari keluarga, tempat tinggal, sekolah, tempat bekerja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

f. Sasaran 6, Terwujudnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Melalui Teknologi Informasi yang Berkualitas.

Keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-6

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 %	Target Tahun 2021 %
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Tersedianya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Ada	Ada	100%	Ada	Ada

Sumber : Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Soppeng 2017

Untuk mengetahui prestasi capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun, dapat membandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.12: Perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran 6

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
	Kondisi Awal	2016	2017
Tersedianya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Ada	100%	100%

Sumber : Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Soppeng

Adapun Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dijelaskan sebagai berikut :

- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Tersedianya Sistem Informasi Pemerintah Daerah” dapat dicapai sebesar 100% pada tahun 2017. Strategi untuk pencapaian indikator kinerja tersebut, didukung adanya kegiatan pembentukan PPID Daerah, website Kabupaten Soppeng dan kegiatan penyelenggaraan persandian dengan target 1 tahun dan dapat direalisasikan selama 1 tahun. Faktor penunjang keberhasilan indikator kinerja ini disamping staf yang sesuai dengan kompetensinya dan komitmen untuk pencapaian target. Kegiatan ini berdampak pada lancarnya informasi potensi Kabupaten Soppeng ke masyarakat dan meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya teknologi informasi menuju penerapan e-government.

g. Sasaran 7, Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pelelangan/Seleksi yang terselesaikan dengan Baik dan Tepat Waktu.

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-7

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 %	Target Tahun 2021 %
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Rasio Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pelelangan/Seleksi yang Selesai Tepat Waktu	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Soppeng 2017

Untuk mengetahui prestasi capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun, dapat membandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.14: Perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran 7

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
	Kondisi Awal	2016	2017
Rasio Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pelelangan/Seleksi yang Selesai Tepat Waktu	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Soppeng

Adapun indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dijelaskan sebagai berikut :

- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Rasio Pelaksanaan Barang/Jasa melalui Pelelangan/Seleksi yang Selesai Tepat Waktu” dapat dicapai sebesar 100% dari target yang direncanakan sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100%. Hal ini didukung dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah antara lain kegiatan penyelenggaraan unit layanan barang/jasa (ULP) sebanyak 103 paket dan pembinaan jasa konstruksi serta dilakukannya monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa guna

yang bertujuan untuk menjadikan kebijakan/program/kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik yang efisiensi, efektif dan transparan untuk kelancaran pembangunan daerah guna menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

h. Sasaran 8, Terasilitasinya Fungsi Koordinasi pada SKPD yang Terkait Tugas Pokok dan Fungsi.

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-7

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 %	Target Tahun 2021 %
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Persentase SKPD yang Terkoordinasi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya	100	95.90	95.90	91.96	100

Sumber : Dokumen Kegiatan Lingkup Setda Kabupaten Soppeng 2017

Untuk mengetahui prestasi capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun, dapat membandingkan dengan menyandingkan capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.16: Perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran 8

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
	Kondisi Awal	2016	2017
Persentase SKPD yang Terkoordinasi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	91,96%	95.90%

Sumber : Dokumen Kegiatan Lingkup Setda Kabupaten Soppeng

Adapun indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dijelaskan sebagai berikut :

- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase SKPD yang Terkoordinasi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya” dapat dicapai sebesar 91,96% pada tahun 2017. Adapun langkah yang dilakukan

untuk mencapai sasaran yakni meningkatkan efektifitas fungsi koordinasi antar perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

i. Sasaran 9, Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

Sasaran ini merupakan sasaran baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-9

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 %	Target Tahun 2021 %
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100	93.17	93.17	-	100

Sumber : Dokumen Kegiatan Lingkup Setda Kabupaten Soppeng 2017

Tingkat pencapaian Sasaran-9 dengan indikator kinerja **persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan** dengan target 100% terealisasi 93.17% dengan capaian kinerja sebesar 93.17%. Realisasi capaian digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.18 : Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan

No.	Jumlah Pegawai yang Merasa Puas	Jumlah Seluruh Pegawai	Persentase
1.	150	161	93.17%
Jumlah	150	161	93.17%

Indikator kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan diukur dengan perhitungan yaitu : jumlah pegawai yang merasa puas dibagi total Jumlah pegawai dikali 100 %.

$$\text{➤ Rumus : } \frac{150 \text{ pegawai}}{161 \text{ pegawai}} \times 100 = 93.17 \%$$

Sasaran ini belum tercapai karena belum tercapainya iklim kerja yang baik, pemenuhan kebutuhan pegawai atau kesejahteraan pegawai belum maksimal, sehingga masih ada pegawai yang merasa belum puas atas pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-9 dengan indikator kinerja sasaran **Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan** meliputi;

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program peningkatan profesionalisme Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

j. Sasaran 10, Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.

Sasaran ini merupakan sasaran baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-10

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 %	Target Tahun 2021 %
	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100	99.92	99.92	-	100

Sumber : Dokumen Kegiatan Lingkup Setda Kabupaten Soppeng 2017

Tingkat pencapaian Sasaran-9 dengan indikator kinerja **persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik** dengan target 100% terealisasi 99.92% dengan capaian kinerja sebesar 99.92%. Realisasi capaian digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.20 : persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

No.	Jumlah sarana & Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah sarana & Prasarana Dalam Kondisi Rusak	Jumlah Total Sarana dan Prasarana	Persentase
1.	3,883	3	3,886	99.92%
Jumlah	3,883	3	3,886	99.92%

Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Soppeng 2017

Indikator sarana dan prasarana dalam kondisi baik diukur dengan perhitungan yaitu : jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi total Jumlah sarana dan prasarana dikali 100 %.

$$\text{➤ Rumus : } \frac{3,883}{3,886} \times 100 = 99.92 \%$$

Sasaran ini tidak tercapai karena masih banyaknya sarana dan prasarana dalam kondisi rusak, sedangkan dana tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang baik.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-4 dengan indikator kinerja sasaran **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** meliputi; ***Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur*** dengan kegiatan;

- Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio dan Komunikasi
- Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2017	REALISASI KINERJA TAHUN 2017
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik	72%	83.3%
2	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Tinggi	Sangat Tinggi
3	Jumlah Insiden terkait kehidupan beragama	Tidak ada insiden	Tidak ada insiden
4	Jumlah nilai investasi (Rp.)	641.321.681.092	-
5	Persentase masyarakat yang tidak menyalahgunakan narkoba	100%	0.02%
6	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	C	C
7	Rasio rumah ibadah/jumlah penduduk	2,06	2,06
8	Persentase penyelenggaraan kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100%	-
9	Jumlah rencana investasi (Jumlah MOU)	35	-

Tabel 3.22 Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
1.	Terlayannya kedinasan KDH & WKDH dengan baik	Persentase Kedinasan yang terlayani dengan baik	100	100
2.	Meningkatnya Jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kelembagaan SKPD yang sesuai kebutuhan	90	90
3.	Meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang melaksanakan SPM	100	83.3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
4.	Terwujudnya Penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rasio Regulasi dan kasus hukum yang terselesaikan	100	100
5.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalagunaan narkoba	Jumlah masyarakat yang menyalahgunakan narkoba	<10 orang	54 orang
6.	Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas	Tersedianya sistem informasi pemerintah daerah	100	100
7.	Terwujudnya Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Rasio Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/ seleksi yang selesai tepat waktu	Ada	Ada
8.	Terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi	Persentase SKPD yang terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya	100	91.96
9.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100	93.17
10.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100	99.92

Tabel 2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

untuk mengetahui akuntabilitas keuangan maka dilakukan analisis efisiensi dalam pencapaian sasaran. Sesuai dengan perjanjian kinerja, rencana penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis tahun 2017 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebesar Rp. 29,2666,773,395.00 dan terealisasi sebesar Rp. 27,727,282,041.00 atau 93.79%.

Rencana dan realisasi penggunaan anggaran untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.21 : Analisis efisiensi pencapaian sasaran strategis tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)			Rata-rata capaian kinerja sasaran %	Ket.
		Target	Realisasi	Serapan Anggaran %		
1	Terlayannya kedinasan KDH & WKDH dengan baik	4,526,700,000	4,140,787,400	91.47	92.00	efisien
2	Meningkatnya Jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	173,647,375	157,477,375	90.69	90.34	Tidak efisien
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD	246,296,700	213,027,175	86.49	84.39	Tidak efisien
4	Terwujudnya Penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	288,055,000	275,150,000	95.54	94.40	Tidak efisien
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalagunaan narkoba	2,082,919,950	2,074,391,650	99.59	99.35	Tidak efisien
6	Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas	256,390,750	256,161,750	99,91	99.94	efisien
7	Terwujudnya Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	264,375,000	234,696,500	88.77	96.41	efisien
8	Terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi	665,973,700	570,616,925	85.68	94.30	efisien
9	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	9,415,028,101	8,963,128,977	95.21	90.31	Tidak efisien
10	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	4,397,254,000	4,095,148,170	93.13	90.96	Tidak efisien

Keterangan :

Efisien jika rata-rata capaian kinerjanya sama atau lebih tinggi dibanding serapan anggarannya.

B. Realisasi Anggaran

Secara umum realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 93,46%. Semula anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp 27.710,520,132.00 kemudian karena setiap SKPD harus melakukan perubahan anggaran, maka anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng setelah perubahan menjadi Rp 29,666,773,395.00 berhasil direalisasikan Rp 27.337.528.602.00 dan sisa anggaran Rp 1,936,245,354.00.

Tabel 3.22 : Rincian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng TA 2017

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
SASARAN 1 : TERLAYANINYA KEDINASAN KDH & WKDH DENGAN BAIK				
1	PROGRAM PENINGKATAN KEDINASAN KDH DAN WKDH	4,526,700,000.00	4,140,787,400.00	91.47
1	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	1,536,000,000.00	1,437,060,000	93.56
2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri	2,018,600,000.00	1,901,560,900.00	94.20
3	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	860,800,000.00	690,866,500.00	80.26
4	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	111,300,000.00	111,300,000.00	100.00
SASARAN 2 : Meningkatnya Jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku				
2	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH	173,647,375.00	157,477,375.00	90.69
5	Penyusunan Kompetensi / Analisis Jabatan	82,196,850.00	76,196,850.00	92.70
6	Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi	44,557,700.00	44,557,700.00	100.00
7	Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi	46,892,825.00	36,722,825.00	78.31
SASARAN 3 : Meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD				
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK	246,296,700.00	213,027,175.00	86.49
8	Penguatan Kinerja Pelayanan Publik	49,589,675.00	37,589,675.00	75.80
9	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	26,979,750.00	26,704,750.00	98.98
10	Inovasi Pelayanan Publik	50,572,500.00	33,342,750.00	65.93
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik	119,154,775.00	115,390,000.00	96.84



No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
SASARAN 4 : Terwujudnya Penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				
4	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	288,005,000.00	275,150,000.00	95.54
12	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	72,330,000.00	61,800,000.00	85.44
13	Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah	159,650,000.00	159,650,000.00	100.00
14	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	29,637,500.00	27,312,500.00	92.16
15	Kegiatan Fasilitasi Sosialisai Peraturan Perundang-undangan	26,387,500.00	26,387,500.00	100.00
5	PROGRAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENDAPAT DAN PENDAMPINGAN HUKUM KELUARGA MISKIN	53,025,000.00	-	
16	Kegiatan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	53,025,000.00	-	
6	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	496,712,500.00	491,085,250.00	98.87
17	Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN	34,600,000.00	30,000,000.00	86.71
18	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	205,798,750.00	204,848,500.00	99.54
19	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	102,450,000.00	102,450,000.00	100.00
20	Kegiatan Kajian peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah	66,155,000.00	66,078,000.00	99.88
21	Publikasi peraturan perundang-undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau	87,708,750.00	87,708,750.00	100.00
SASARAN 5 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalagunaan narkoba				
7	PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KESRA, KEAGAMAAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA	1,586,207,450.00	1,583,306,400.00	99.82
22	Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/ Pemulangan Jamaah haji	448,937,500.00	448,936,500.00	100.00
23	Fasilitasi pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan	249,895,050.00	249,895,000.00	100.00
24	Fasilitasi pelaksanaan/keikutsertaan MTQ & STQ	119,360,000.00	119,360,000.00	100.00
25	Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak	84,590,000.00	84,590,000.00	100.00



No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Shaleh			
26	Pengembangan nilai budaya LASQI	42,617,500.00	42,617,500.00	100.00
27	Peningkatan nilai-nilai keagamaan	131,587,450.00	128,787,450.00	97.87
28	Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui sistem pencegahan penyalagunaan & pemberantasan gelap Narkoba (P4GN)	509,219,950.00	509,119,950.00	99.98
SASARAN 6 : Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas				
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN	256,390,750.00	256,161,750.00	99.91
29	Orientasi Keprotokoleran	70,453,850.00	70,453,850.00	100.00
30	Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran	185,936,900.00	185,707,900.00	99.88
SASARAN 7 : Terwujudnya Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu				
9	PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	54,775,000.00	54,721,500.00	99.90
31	Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se- Kabupaten Soppeng	14,115,000.00	14,115,000.00	100.00
32	Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten	40,660,000.00	40,606,500.00	99.87
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	209,600,000.00	179,975,000.00	85.87
33	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)	208,225,000.00	178,600,000.00	85.77
34	Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa	1,375,000.00	1,375,000.00	100.00
SASARAN 8 : Terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi				
11	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA	546,948,700.00	481,666,925.00	88.06
35	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	47,667,125.00	37,116,100.00	77.87
36	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	44,401,600.00	41,101,500.00	92.57
37	Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal	156,254,850.00	132,924,425.00	85.07
38	Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan darat dan data Pameran Pemerintah Daerah	550,000.00	550,000.00	100.00
39	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00



No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
40	Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00
41	Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	26,400,000.00	26,400,000.00	100.00
42	Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng	19,550,000.00	19,550,000.00	100.00
43	Fasilitasi Agen/ Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00
44	Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian	10,525,000.00	6,524,925.00	61.99
45	Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran	9,003,925.00	9,003,925.00	100.00
46	Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu lintas Ternak	11,512,500.00	11,512,500.00	100.00
47	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	24,870,000.00	24,870,000.00	100.00
48	Fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal	82,700,000.00	82,700,000.00	100.00
49	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD	21,850,000.00	-	
50	Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	6,703,700.00	6,703,550.00	100.00
51	Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat	26,060,000.00	23,810,000.00	91.37
12	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	119,025,000.00	88,950,000.00	74.73
52	Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	19,275,000.00	-	
53	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	20,700,000.00	20,700,000.00	100.00
54	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten	79,050,000.00	68,250,000.00	86.34
SASARAN 9 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan				
13	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	8,790,362,551.00	8,379,627,356.00	95.33
55	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	376,435,000.00	372,795,000.00	99.03
56	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	1,845,654,375.00	1,701,073,188.00	92.17
57	Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta	465,000,000.00	461,167,400.00	99.18



No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
58	Penyediaan Jasa Perkantoran	105,466,200.00	89,366,550.00	84.73
59	Penyediaan jasa administrasi keuangan	412,560,275.00	410,774,000.00	99.57
60	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,273,675,000.00	1,127,664,363.00	88.54
61	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	54,300,000.00	45,273,345.00	83.38
62	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	309,275,000.00	309,275,000.00	100.00
63	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	130,000,000.00	116,602,560.00	89.69
64	Penyediaan bahan logistik kantor	40,000,000.00	39,920,000.00	99.80
65	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	2,722,996,701.00	2,686,835,950.00	98.67
66	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	1,020,000,000.00	1,017,535,000.00	99.76
67	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	35,000,000.00	1,345,000.00	3.84
14	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR	459,890,075.00	419,226,621.00	91.16
68	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	125,000,000.00	125,000,000.00	100.00
69	Peningkatan disiplin aparatur	27,538,600.00	20,942,875.00	76.05
70	Administrasi kepegawaian	47,134,450.00	45,226,450.00	95.95
71	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	260,217,025.00	228,057,296.00	87.64
15	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	164,775,475.00	164,275,000.00	99.70
72	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	37,037,425.00	37,012,000.00	99.93
73	Penyusunan laporan keuangan semesteran	12,450,625.00	12,377,000.00	99.41
74	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19,449,925.00	19,359,500.00	99.54
75	Peningkatan Manajemen Aset	95,837,500.00	95,526,500.00	99.68
SASARAN 10 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor				
16	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4,397,254,000.00	4,095,148,170.00	93.13
76	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio dan Komunikasi	10,000,000.00	9,955,000.00	99.55
77	Pengadaan peralatan rumah		219,800,000.00	80.15



No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	jabatan/dinas	274,250,000.00		
78	Pengadaan peralatan gedung kantor	490,741,000.00	477,617,290.00	97.33
79	Pengadaan mebeleur	259,800,000.00	254,800,000.00	98.08
80	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	232,000,000.00	226,500,000.00	97.63
81	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00
82	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	405,000,000.00	393,000,000.00	97.04
83	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	474,000,000.00	318,187,890.00	67.13
84	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2,010,599,000.00	1,982,747,990.00	98.61
85	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	75,864,000.00	64,275,000.00	84.72
86	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	85,000,000.00	68,265,000.00	80.31
JUMLAH		22,369,615,576.00	20,980,585,922.00	93.79

Rata-rata capaian setiap program diatas 90%. Program yang tidak terelisasi yaitu Program pemberian pertimbangan pendapat dan pendampingan hokum keluarga miskin dengan kegiatan Kegiatan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dengan anggaran sebesar Rp53,025,000, Program Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan Pemda dengan kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD dengan anggaran sebesar Rp21,850,000 serta Program Peningkatan Pengembangan sistem Evaluasi kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dengan anggaran sebesar Rp19,275,000,-

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pencapaian kinerja dari sasaran-sasaran strategisnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2016 - 2021 dan dokumen Perencanaan Lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis terlayannya kedinasan KDH dan WKDH dengan baik, dengan indikator kinerja mencapai hasil rata-rata 100%. Faktor pendukung keberhasilan ini adalah memberikan fasilitasi terhadap pelayanan kedinasan KDH dan WKDH dengan baik.
2. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan indikator kinerja mencapai hasil rata-rata 100%. Hal ini didukung dengan melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dengan capaian kinerja rata-rata 83,3% dari target 100%. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memenuhi target yakni melengkapi regulasi bidang ketatalaksanaan dan peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap kualitas pelayanan publik.

4. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis terwujudnya penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan jumlah indikator kinerja mencapai hasil rata-rata 100%. Faktor pendukung lainnya dengan memberikan fasilitasi dalam penyusunan regulasi dan penyelesaian kasus hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, dengan hasil capaian kinerja rata-rata 0,02%. Adapun strategi pemerintah daerah dalam menekan jumlah yang setiap tahunnya bertambah dengan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi semua kalangan.
6. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas, dengan capaian kinerja rata-rata 100%. Faktor pendukung keberhasilan dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya teknologi informasi menuju penerapan e-government.
7. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan indikator kinerja mencapai hasil rata-rata 100%. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan tersebut dengan meningkatkan efektifitas penyelesaian pengadaan barang/jasa melalui monitoring pelaksanaan guna menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
8. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi, dengan indikator kinerja mencapai hasil rata-rata 91.96%. Hal ini didukung dengan meningkatkan efektifitas fungsi koordinasi antar perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

9. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan dengan indikator persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan mencapai hasil 93.17 %.
10. Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik mencapai hasil 99.92 %.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 10 (sepuluh) sasaran strategis beserta indikator kinerjanya menunjukkan baik setiap tahun, walau demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti diharapkan, yaitu :

1. Persentase SKPD pelayanan publik yang melaksanakan SPM.
2. Jumlah masyarakat yang menyalahgunakan narkoba.
3. Persentase SKPD yang terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut diatas upaya yang ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan selaku penyusun penetapan kinerja/perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi dan pemahaman tiap bagian akan bahan penyusunan laporan kinerja perlu ditingkatkan agar selesai tepat waktu dengan data yang akurat.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 10 sasaran tersebut, secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Sekretariat daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp29,666,773,395,- dan terealisasi sebesar Rp27,727,282,041.00 (93,46%).

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Sekretariat Daerah telah menggunakan anggaran Belanja langsung sebesar Rp20.980.585.922.00 dari total anggaran Belanja langsung sebesar Rp22,369,615,576.00 atau 98,24%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat Daerah telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Soppeng.

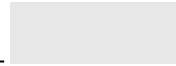
Watansoppeng, Februari 2018

Sekretaris Daerah,

Drs. H. ANDI TENRI SESSU, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 196405281991031009



LAMPIRAN